

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)	Timeline Renaksi (Triwulan I/II/III/IV)
<b>A</b>	<b>Bagian Umum dan TU</b>						
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp 29.722.791.000	<p>1. Perencanaan dan Organisasi</p> <p>Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan</p> <p>Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO di dalam Sakti</p> <p>Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran BKU dan SBKK yang ditetapkan</p> <p>Melakukan penyusunan SAKIP dan LKJIP sesuai ketentuan</p> <p>Menyusun dan kompilasi Manajemen Risiko Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>Menyusun dan kompilasi SPIP Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>2. Keuangan</p> <p>Melakukan monitoring pengendalian revisi DIPA pagu tetap.</p> <p>Monitoring akurasi / ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja</p> <p>Monitoring akselerasi belanja berdasarkan target penyerapan per jenis belanja.</p> <p>Monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP.</p> <p>Monitoring akselerasi pencapaian output berkualitas.</p> <p>Monitoring pengelolaan rekening pemerintah berupa pencocokan / update data penggunaan rekening dan saldo rekening.</p> <p>Monitoring sertifikasi pengelola keuangan.</p> <p>Melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan.</p> <p>3. Pengelolaan BMN</p> <p>Melakukan penyusunan Wasdal Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2024</p> <p>Melakukan penghapusan terhadap aset yang telah rusak berat</p> <p>Melakukan penyusunan RKBMN Tahun 2024 aplikasi SIMAN dan SIP BMN</p> <p>Melakukan inventarisasi BMN pada setiap bagian dan setiap divisi</p> <p>4. Kepegawaian/SDM</p> <p>Sosialisasi penegakan disiplin pegawai</p> <p>Pelaksanaan ujian kedinasan dan Penyesuaian ijazah</p> <p>Terlaksananya penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan anjab dan ABK</p> <p>Pengembangan kompetensi pegawai melalui pengajuan usul pelatihan bagi pegawai</p> <p>Pelaksanaan surat menyurat melalui aplikasi srikandi</p> <p>Laporan LHKSN SERAYA dan pelaporan SPT Tahunan</p>	<p>III dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>II dan IV</p> <p>II</p> <p>IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I dan III</p> <p>III dan IV</p> <p>II dan III</p> <p>III dan IV</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I</p>



	Hukum di Wilayah	JDIHN di Wilayah	terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah				Promosi, penerbitan dan kerja sama JDIH di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pengelolaan perpustakaan hukum	I, II, III, dan IV
							Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total	82%	Rp 376.000.000		Pemeriksaan dan upaya hukum biasa	I, II, III, dan IV
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non	80%	Rp 64.020.000		Upaya hukum luar biasa	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Rp 359.663.000		Penyebarluasan informasi dan penanganan perkara di luar pengadilan	I, II, III, dan IV
							Konseling	I, II, III, dan IV
							Kegiatan penyuluhan hukum di daerah	I, II, III, dan IV
							Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum	I, II, III, dan IV
							Pemantuan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum	I, II, III, dan IV
							Internalisasi permasalahan hukum di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pembinaan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	I, II, III, dan IV
							Penyelenggaraan Paralegal Justice Award di wilayah	I, II, III, dan IV
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp 232.053.000		Persiapan sosialisasi diskusi strategi kebijakan hukum	I
							Pelaksanaan sosialisasi diskusi strategi kebijakan hukum	I, II, III, dan IV
							Pelaporan sosialisasi diskusi strategi kebijakan hukum	IV
							Analisis strategi kebijakan hukum	IV
<b>C Divisi Pelayanan Hukum</b>								
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp 1.526.352.000		Pelayanan kewarganegaraan	I, II, III, dan IV
							Pelantikan PPNS	I, II, III, dan IV
							Pelantikan notaris	I, II, III, dan IV
							Pelayanan AHU lainnya	I, II, III, dan IV
							Migrasi data layanan AHU	I, II, III, dan IV
							Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/W orkshop/Pendalaman materi Layanan AHU di wilayah	I, II, III, dan IV
							Kegiatan publikasi, pameran dan helpdesk	I, II, III, dan IV
							Koordinasi layanan AHU di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan AHU di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pelaporan pemantauan dan evaluasi layanan AHU di wilayah	IV
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor	90%	Rp 900.330.000		Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MPW	I, II, III, dan IV
							Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MPD	I, II, III, dan IV
							Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MKNW	I, II, III, dan IV
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp 137.890.000		Pengawasan Hak KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Pendampingan penanganan aduan/pelanggaran KI di wilayah	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Rp 845.695.000		Persiapan diseminasi dan edukasi KI di wilayah	I
							Pelaksanaan diseminasi dan edukasi KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Evaluasi dan pelaporan diseminasi dan edukasi KI di wilayah	IV
							Pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak KI	I, II, III, dan IV
							Pendampingan pengajuan permohonan KI di wilayah	I, II, III, dan IV
							Evaluasi dan pelaporan layanan KI di wilayah	IV
			2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Rp 875.288.000			

Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke.

Jonny Pesta Simamora